

Politik Luar Negeri Taiwan Terhadap China Di Bawah Kepemimpinan *Ma Ying Jeou* (2008-2012)

Tania Dwi Tamara¹, Ismah Rustam¹, Zulkarnain¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
taniadwitamara306@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes Taiwan's foreign policy chosen by Ma Ying Jeou as means to establish peaceful relations with China. The background of this research is based on the conflictual relations between China and Taiwan before Ma Ying Jeou ruled Taiwan, which was caused by certain policies that angered China. This research uses foreign policy theory and the concept of idiosyncrasy. This research uses qualitative descriptive methodology; secondary data is sourced from library research where relevant sources are collected. The result of this research concludes that the foreign policy implemented by Ma Ying Jeou was received positively by China. The policies are: Three no's policy, re-opening of SEF and ARATS dialogue, the opening of economic relations, ECFA between China and Taiwan, and re-implementation of the 1992 consensus. The conclusion from the implemented policies shows that Ma Ying Jeou has achieved his goal to establish peaceful relations with China. The proofs include the increased relation intensity and the decrease of conflict and tensions between China and Taiwan.

Keywords: Foreign Policy, Idiosyncrasy, Peaceful Relations.

ABSTRAK

Paper ini akan menganalisis tentang kebijakan-kebijakan Luar Negeri Taiwan yang diambil oleh *Ma Ying Jeou* untuk melakukan hubungan damai dengan China. Latar belakang penelitian ini berdasarkan hubungan konflikual yang terjalin antara China dan Taiwan saat masa kepemimpinan sebelum *Ma Ying Jeou*, yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Taiwan yang selalu menyulut kemarahan China. Sudut pandang yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah Teori Politik Luar Negeri dan Konsep Idiosinkratik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sumber data yang diperoleh yakni data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan sumber bacaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini ialah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh *Ma Ying Jeou* untuk berdamai dengan China, mendapatkan respon yang positif dari China. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: Kebijakan *Three No's Policy*, dibukanya kembali dialog antara *SEF* dan *ARATS*, dibukanya kerjasama ekonomi *ECFA* antara China dan Taiwan, dan mengimplementasikan kembali konsensus 1992. melalui kebijakan-kebijakan tersebut, *Ma Ying Jeou* telah berhasil mencapai tujuannya untuk melakukan hubungan damai dengan China. Hal itu, ditandai dengan meningkatnya intensitas kerjasama, dan berkurangnya konflik serta ketegangan yang terjadi antara China dan Taiwan.

Kata Kunci: Hubungan Damai, Idiosinkrasi, Kebijakan Luar Negeri.

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan sebelum *Ma Ying Jeou*, hubungan antar China dan Taiwan tak pernah luput dari konflik, entah itu disebabkan oleh faktor eksternal maupun kebijakan Taiwan sendiri yang menyulut kemarahan China. Namun, pada saat terpilihnya *Ma Ying Jeou* sebagai presiden Taiwan pada tahun 2008, mengalahkan lawannya Frank Hseis Chang-Ting dari partai DPP dengan perolehan suara mencapai

58% suara (Jehnings, 2008). Dalam pidato pengangkatannya, *Ma Ying Jeou* menyebutkan, "*We will strengthen bilateral relations with the US, our defense allies and leading trading partners. We will review the budget for defense and buy a much-needed weapon system, to build a strong army. On the other hand we must maintain national stability and peace in the Taiwan Strait*" (Johnston, 2008).

Setelah menjabat sebagai presiden, *Ma Ying Jeou* terlihat memiliki perbedaan kebijakan dengan para pendahulunya, dimana sebelumnya para pendahulunya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyulut kemarahan China dan bahkan kebijakan yang mengarah kepada permusuhan terhadap China. Namun, *Ma Ying Jeou* justru mengeluarkan kebijakan yang membuat hubungan Taiwan dan China mulai membaik. Penulisan ini akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil oleh *Ma Ying Jeou* dalam mencapai hubungan damai dengan China dari tahun 2008-2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik luar negeri Taiwan terhadap China di bawah kepemimpinan *Ma Ying Jeou*, kebijakan apa saja yang dikeluarkan *Ma Ying Jeou* untuk menormalisasi hubungan dengan China, bagaimana politik luar negeri *Ma Ying Jeou* dilihat dari faktor Idiosinkratik, dan bagaimana perkembangan hubungan antara China dan Taiwan dibawah kepemimpinan *Ma Ying Jeou*.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas bagaimana perbedaan politik luar negeri yang diambil oleh Taiwan untuk menghadapi China dan kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil oleh *Ma Ying Jeou* untuk berdamai dengan China. Kemudian, penulis menganalisis idiosinkratik *Ma Ying Jeou* dilihat dari perjalanan hidup dan latar belakang politiknya. Terakhir, penulis menganalisis perkembangan hubungan antara China dan Taiwan setelah *Ma Ying Jeou* memimpin.

TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan terdahulu menjadi salah satu bahan acuan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat memperbanyak sumber dan teori yang digunakan untuk mengkaji studi kasus. Dari beberapa buku dan penulisan dalam jurnal maupun artikel yang ditemukan, tidak terdapat bacaan dengan judul yang sama dengan judul penelitian ini namun penulis telah menemukan dan memilah beberapa tulisan terdahulu yang memiliki tema serupa.

Literatur pertama yang menjadi referensi adalah buku yang berjudul "*Foreign Policy Making In Taiwan*", buku ini ditulis oleh *Dennis Van Vranken Hickey*, diterbitkan di New York, USA, oleh Routledge tahun 2007 (Hickey, 2007). Secara umum, buku ini membahas tentang kebijakan luar negeri Taiwan serta faktor-faktor pembuatan kebijakan politik tersebut dari sejak dipimpin oleh Chian Khai-sek sampai Chen Sui-bian. Dalam buku ini juga, dipaparkan bagaimana hubungan luar negeri Taiwan dengan berbagai macam negara yang ada di dunia, khususnya dengan China dan AS. Penulis juga memaparkan bagaimana perjalanan politik Taiwan dari mulai masa keemasan Taiwan pada tahun 1950-1971, pada saat itu Taiwan yang sedang berkonflik dengan China daratan beraliansi dengan AS untuk melawan China daratan yang saat itu dibantu oleh Uni Soviet sampai pada saat Taiwan terdaftar sebagai anggota PBB menjadi wakil dari pemerintahan China yang sah, hingga ditetapkan sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB.

Pada masa keterpurukan Taiwan yang mengalami isolasi diplomatik pada tahun 1971-1988, AS mulai menormalisasi hubungannya dengan China daratan, AS dan PBB pun mulai mengakui China daratan sebagai pemerintahan China yang sah sehingga membuat Taiwan harus dikeluarkan dari keanggotaan PBB karena adanya sistem 'One China'. Buku ini sangat cocok dijadikan referensi penulis dalam menulis skripsi ini, mengingat judul skripsi ini yang mengarah kepada kebijakan luar negeri Taiwan. Meskipun dalam buku tersebut tidak terdapat kebijakan luar negeri pada saat pemerintahan *Ma Ying Jeou*, namun sedikit tidak dapat membantu penulis dalam menganalisis kebijakan luar negeri Taiwan, khususnya terhadap China.

Literatur kedua adalah buku yang berjudul "The Future of United States, China, and Taiwan Relations", yang ditulis oleh *Cheng-yi Lin* dan *Denny Roy*, diterbitkan pada tahun 2011 di *United States*, oleh Palgrave Macmillan (C. Y. Lin & Roy, 2011). Sesuai judulnya, secara umum buku ini membahas tentang hubungan AS, China, dan Taiwan. Dimana kebangkitan ekonomi serta militer yang dimiliki oleh China menjadi tantangan baru bagi Taiwan dan AS dalam mengambil kebijakan luar negeri. Tumbuhnya kekuatan China dapat memperkuat posisi China dalam hubungan antar selat Taiwan, dan membuat rumit posisi AS sebagai penjamin keamanan Taiwan di masa depan.

Penulis menuturkan bahwa Taiwan dan AS mengabaikan pentingnya kerjasama dalam membendung kebangkitan China dan ketidakseimbangan kekuatan di Asia Timur khususnya di selat Taiwan, dikarenakan mereka saling berlomba-lomba dalam memperbaiki hubungan dengan China. Presiden Ma sendiri berharap mendapat dukungan dari AS dalam memperbaiki hubungannya dengan China karena AS dianggap menempa hubungan yang dekat dengan China, namun sayangnya AS menuturkan bahwa ia memiliki sedikit pengaruh dalam negosiasi hubungan antar China dan Taiwan. Perkembangan hubungan Taiwan dan China mengalami dramatisasi dalam 60 tahun terakhir, khususnya pada saat pemerintahan *Ma Ying Jeou*, hubungan Taiwan-China mulai membaik. Selanjutnya adalah bagaimana AS akan menyesuaikan diri dengan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti kerjasama ekonomi yang dibangun oleh Taiwan dan China melalui ECFA, dan juga perjanjian damai antar Taiwan dan China. Buku ini sangat cocok dijadikan referensi bagi penulis, karena dalam tulisannya berisi banyak sekali tentang hubungan antar China dan Taiwan yang dapat membantu penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Kemudian, literatur selanjutnya adalah jurnal yang berjudul "Pengaruh Idiosinkratik *Shinzo Abe* terhadap Upaya Perubahan kebijakan Luar Negeri Jepang dari Pasifisme Idealis menjadi Pasifisme Proaktif" Vol. 7 No. 3 Desember 2018 (Laksono, 2018). Jurnal ini secara umum membahas tentang latar belakang kehidupan *Shinzo Abe* dan pandangan *Shinzo Abe* tentang Pasifisme Idealis sampai terbentuknya Pasifisme Proaktif, dan kemudian menganalisis Idiosinkratik *Shinzo Abe* dan perubahan kebijakan luar negeri Jepang. Tulisan ini menjelaskan mengenai sisi idiosinkratik *Shinzo Abe*. Pertama dari sisi kepribadian, terdapat 4 (empat) tipe kepribadian, dimana *Shinzo Abe* disebut memiliki kepribadian *narcissist* atau narsisis yang merupakan individu dengan kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Tipe kepribadian narsisis sesuai dengan kepribadian *Abe* dimana *Abe* merupakan pemimpin yang memiliki percaya diri yang tinggi, ambisi yang kuat, serta fantasinya yang berlebihan. Seperti halnya ketika *Abe* menjabat sebagai Perdana Menteri, ia selalu memiliki ambisi

yang tinggi dengan berupaya untuk mengubah kebijakan pasifisme idealis Jepang pasca perang menjadi pasifisme proaktif dengan mulai merevisi konstitusi Pasal 9.

Kemudian yang kedua yaitu gaya kepemimpinan, gaya pemimpin yang dimiliki oleh Abe adalah *incremental* yakni fokus perhatian pada peningkatan ekonomi atau keamanan negara bagian dalam langkah untuk menghindari rintangan yang pasti akan muncul di sepanjang jalan. Gaya kepemimpinan *incremental* pada Abe terlihat ketika Abe berusaha untuk meningkatkan keamanan negaranya dengan cara menetapkan *National Security Strategy* atau NSS pertama Jepang bersama dengan *National Defense Program Guidelines* atau NDPG yang baru. Idiosinkratik *Shinzo Abe* yang ketiga yaitu gaya pembuat keputusan. Terdapat dua karakteristik dalam gaya pembuat keputusan, yaitu *situational characteristic* dan *problem characteristic*.

Berdasarkan kedua karakteristik gaya pembuat keputusan tersebut, Abe termasuk ke dalam gaya pembuat keputusan *situational characteristic*. Dalam hal ini, terdapat adanya pengaruh lingkungan terhadap individu dimana individu memproses informasi dan konsekuensi perilaku yang pada gilirannya mempengaruhi respon terhadap kondisi lingkungan tersebut. Informasi dan tekanan waktu, persepsi ancaman dan risikonya, kelelahan dan ketidakpastian, konflik dalam kelompok, tantangan hingga kehilangan kontrol merupakan bagian dari faktor lingkungan yang mempengaruhi kompleksitas integrative. Gaya pembuat keputusan *situational characteristic* Abe ini didasarkan pada faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhinya, sehingga hal ini relevan dengan adanya kompleksitas integratif. Termasuk juga dengan adanya tekanan, persepsi ancaman, hingga keinginan Abe untuk memproyeksikan citra tertentu, sifat dan opini yang dirasakan dalam melihat situasi.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu mencari sumber-sumber informasi terkait kebijakan luar negeri yang di keluarkan oleh *Ma Ying Jeou* terhadap China melalui pengumpulan data, menganalisa data, serta mengintepretasikannya dalam sebuah tulisan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka atau biasa disebut dengan studi literatur dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, dan data-data dari internet yang tingkat kapabilitasnya terhadap permasalahan yang dihadapi dan valid. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang di peroleh dari penelitian, menggunakan metode kualitatif. Analisis masalah digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan fakta lainnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

POLITIK LUAR NEGERI

Menurut James N. Rosenau, politik luar negeri merupakan suatu mekanisme interaksi negara negara dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap negara memiliki karakteristik politik luar negeri yang berbeda-beda. Keadaan sebuah negara tentu akan mempengaruhi politik luar negerinya. Baik itu keadaan internal maupun keadaan internal. Negara yang memiliki lingkungan strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda (Eby Hara, 2011). Politik luar negeri dapat diartikan juga

sebagai suatu kebijakan, sikap, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu negara dalam melakukan hubungan luar negerinya dengan negara lain, selain itu juga interaksi antar negara dengan aktor non-negara seperti organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan negara yang melakukan politik luar negeri tersebut. Politik luar negeri dapat menjadi pedoman bagi sebuah negara dalam menjalankan tindakan yang akan dilakukannya jika berhubungan dengan negara lain, agar tujuan nasional negaranya dapat tercapai.

Menurut James N. Rosenau, politik luar negeri merupakan suatu mekanisme interaksi negara dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi sebuah negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Negara yang memiliki lingkungan strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda (Eby Hara, 2011). Contohnya seperti Taiwan, letak geografisnya berdekatan dengan China, dan keduanya memiliki hubungan yang konfliktual. Ditengah-tengah kebangkitan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh China, apalagi dengan sifat China yang *offensive* terhadap Taiwan. Hal tersebut mendorong *Ma Ying Jeou* mengambil tindakan perdamaian terhadap China melalui kerjasama ekonomi, dengan membaiknya hubungan China dan Taiwan, *Ma Ying Jeou* berharap China bisa sedikit lebih lunak terhadap Taiwan dan tidak lagi bersikap *offensive* terhadap Taiwan.

KONSEP IDIOSINKRATIK

Idiosinkratik merupakan sebuah konsep yang menjadi turunan dari teori kebijakan luar negeri dengan melihat pada aspek kepemimpinan seorang individu. Idiosinkratik dapat diartikan sebagai sifat yang unik dan spesial dari seorang pemimpin atau pembuat keputusan yang menentukan dan menerapkan kebijakan luar negeri. Jadi, variabel individu berkaitan dengan sikap pembuat keputusan yang berbeda dengan orang lain seandainya orang tersebut menduduki posisi yang sama.

Variabel idiosinkratik meliputi semua aspek yang ada pada pembuat keputusan seperti nilai-nilainya, keahlian dan pengalamannya yang membedakan para pembuat keputusan yang lain (Eby Hara, 2011, pp. 105–106). Idiosinkratik dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya ialah latar belakang dari individu dan lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam buku yang berjudul "*Understanding Foreign Policy Decision Making*" karya Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. tahun 2010, ada 5 (lima) indikator yang sangat berpengaruh terhadap berbagai macam keputusan kebijakan luar negeri yang diambil oleh seorang individu menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr., yakni: *Personality*, *Physical* dan *Mental Health*, *Ego/Personality* dan *Ambition*, *Political History* dan *Personal Experiences, Perceptions and Operational Reality* (Mintz & DeRouen Jr., 2010, p. 211).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum masa pemerintahan *Ma Ying Jeou*, hubungan antar China dan Taiwan tak pernah luput dari konflik, entah itu disebabkan oleh faktor eksternal maupun kebijakan Taiwan sendiri yang menyulut kemarahan China. Namun, dapat terlihat pada tahun 2008, *Ma Ying Jeou* terpilih sebagai presiden Taiwan dan membawa angin segar bagi hubungan konfliktual Taiwan dan China. Presiden *Ma Ying Jeou* pada sejak masa kampanye telah menjanjikan adanya normalisasi hubungan antara Taiwan dan China

serta kebijakan yang akan memperkuat hubungan bilateral dalam bidang ekonomi diantara kedua negara, dimana sebelumnya hubungan tersebut sempat terganggu pada masa pemerintahan sebelumnya. Sejak masa kampanye, Ma telah menjanjikan adanya normalisasi hubungan dengan China. Maka, dalam mencapai tujuannya untuk berdamai dengan China, Ma melakukan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada perdamaian terhadap China seperti dijelaskan di bawah ini.

MEMBUKA KEMBALI DIALOG ANTARA SEF DAN ARATS

SEF dan ARATS adalah organisasi semi pemerintah yang sengaja dibentuk untuk menjadi media dalam menjalin hubungan informal antara Taiwan dan China. Meski hubungan antara SEF dan ARATS sempat terputus selama 10 tahun lamanya ketika masa pemerintahan Lee Teng-hui (Sullivan & Sapir, 2012, p. 36), namun *Ma Ying Jeou* berhasil membuka kembali hubungan antara SEF dan ARATS dengan tujuan untuk menormalisasi hubungan antara Taiwan dan China. Lewat dialog antara SEF dan ARATS inilah intensitas bertemu antara Taiwan dan China semakin meningkat. SEF dan ARATS melakukan beberapa kali pertemuan dan membahas beberapa kerjasamaan kesepakatan antara China dan Taiwan, antara lain pembentukan ECFA, bahkan pembentukan ECFA sendiri berjalan selama 6 bulan lamanya dan melewati 5 kali negosiasi (Y. C. G. Lin, 2011).

Pertemuan SEF dan ARATS juga membahas kesepakatan terkait dengan hukum untuk melindungi investasi kedua negara, pembahasan ini dilakukan dalam dua kali pertemuan karena pertemuan sebelumnya tidak menghasilkan opini yang sependapat antar Taiwan dan China. Kemudian pertemuan selanjutnya membahas tentang prospek, tujuan, dan area awal di dalam kerjasama industri antara Taiwan dan China. Kemudian, pada tahun 2012 SEF dan ARATS mengadakan pertemuan kembali yang melahirkan dua kerjasama lanjutan dari ECFA, yaitu Perjanjian Perlindungan dan Promosi Investasi Antar-selat dan Perjanjian Kerjasama Bea Cukai Antar-Selat (Mainland Affairs Council, n.d.). SEF dan ARATS juga menjadi wadah bagi Taiwan dan China dalam berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan lintas-selat dan dalam hubungan kerjasama yang terjalin. Hubungan yang dibangun antara kelompok SEF dan ARATS ini menjadi sebuah bentuk hubungan komunikasi institusional antara China dan Taiwan yang berlangsung dengan baik hingga kini.

MEMBUKA KERJASAMA EKONOMI ECFA

ECFA merupakan perjanjian lintas-selat dan kerangka kerjasama ekonomi antar Taiwan dan China, yang berpegang pada prinsip-prinsip kesetaraan, timbal balik dan progresif dengan maksud untuk memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi antar lintas-selat. Melalui terbentuknya ECFA, Ma mengharapkan terjadi peningkatan frekuensi pertemuan antara China dan Taiwan melalui pertemuan kedua organisasi SEF dan ARATS, karena China merasa kebutuhan untuk membicarakan mengenai berbagai kerjasama ekonomi ke depannya akan semakin intens. Sehingga diharapkan ECFA dapat menjadi wadah bagi China dan Taiwan untuk melaksanakan koordinasi yang jauh lebih intens dalam segala bentuk kebijakan dan menjadi wadah bagi Taiwan untuk menjalin hubungan yang damai dengan China.

Hasilnya, melalui upaya tersebut dapat terlihat diadakannya pertemuan secara rutin yang dilaksanakan antara organisasi SEF dan ARATS sejak ditandatanganinya ECFA pada tahun 2010. Melalui perjanjian tersebut, masalah-masalah yang dianggap penting akan menjadi prioritas utama kedua negara dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena dengan menyelesaikan masalah yang simpel terlebih dahulu dibandingkan masalah kompleks sangat cocok untuk digunakan di dalam konteks hubungan kerjasama yang rumit antara Taiwan dan China (Mainland Affairs Council, 2009, p. 5). Maka, lewat kerjasama ekonomi ECFA ini, Ma telah mampu merubah hubungan antara China dan Taiwan menjadi lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

KEBIJAKAN *THREE NO'S POLICY*

Dalam upaya menormalisasi hubungan dengan China, Ma juga mengeluarkan kebijakan *Three No's Policy*, yang memiliki arti "*No Independence, No Unification, and No Use of Force*" (Goldstein, 2012). Melalui kebijakan ini diharapkan tidak ada tindakan militer dalam upaya penyelesaian masalah antara China dan Taiwan dimana Taiwan tetap menjadi negara independen yang berhubungan baik dengan China. Arti yang terkandung dalam *nounification* adalah tidak ada penyatuan kembali antara China dan Taiwan. Ikrar ini bertujuan untuk menjatuhkan harapan Partai Komunis China (PKC) yang membawa harapan tinggi tentang apa yang akan membawa kemenangan KMT, karena di sini pihak PKC berharap jika KMT menang, maka Taiwan akan menyatukan diri kembali dengan China (Taipei Times, 2008).

No independence sendiri memiliki arti bahwa Taiwan tidak mengejar kemerdekaan secara *de jure*. Ikrar ini juga ditujukan kepada China dan hal ini juga sangat disambut baik oleh Amerika Serikat dan negara di berbagai belahan dunia. Bagi Ma, Taiwan tidak perlu memproklamkan kemerdekaan untuk kedua kalinya, karena pada tahun 1949 Taiwan sudah resmi mendeklarasikan diri sebagai negara yang berdaulat, sedangkan *No Use of Force* yang terkandung dalam *Three No's Policy* memiliki makna tidak ada penggunaan senjata atau kekuatan di antara Taiwan dan China (Taipei Times, 2008).

KEBIJAKAN LAIN TERKAIT PERBAIKAN HUBUNGAN TAIWAN-CHINA

Kebijakan lainnya yang dikeluarkan *Ma Ying Jeou* dalam memperbaiki hubungannya dengan China, antara lain ialah pengakuan kembali terhadap Konsensus 1992 (Taipei Economic and Cultural Office in Canada, n.d.). Konsensus tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintahan kedua pihak, yang diwakili oleh kedua organisasi SEF dan ARATS, terhadap prinsip '*One China*' yaitu Taiwan dan China mengakui bahwa hanya ada satu 'China', tetapi kedua belah pihak diberi kebebasan untuk menginterpretasikan definisi dari '*One China*' itu sendiri (Taipei Economic and Cultural Office in Canada, n.d.). Kemudian, Ma mulai mengurangi larangan-larangan bagi warganya untuk berinvestasi di China ataupun bagi warga China untuk berinvestasi di Taiwan. Ma juga membuka penerbangan secara langsung antara Taiwan dan China, begitu juga sebaliknya (VOA Indonesia, n.d.).

Disisi lain, *Ma Ying Jeou* juga memberikan sinyal baik kepada China dengan menekan anggaran pertahanan Taiwan, agar persepsi positif China terhadap Taiwan

dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik. Saat *Ma Ying Jeou* memimpin pada tahun 2008-2012, anggaran pertahanan Taiwan tidak pernah lebih dari 3% dari keseluruhan PDB Taiwan, meskipun 3% adalah batas minimum yang dijanjikan oleh Presiden *Ma Ying Jeou* pada masa kampanyenya (Minnick, 2012). Hal tersebut menjadi bukti bahwa Taiwan tidak ingin berlomba-lomba dalam meningkatkan kekuatan militernya dengan China agar China sedikit lebih lunak kepada Taiwan dan tidak bersikap *offensive* lagi.

FAKTOR IDIOSINKRATIK PEMBENTUK KEBIJAKAN MA YING JEOU DALAM BERDAMAI DENGAN CHINA MENURUT TEORI ALEX MINTZ

Terdapat beberapa faktor idiosinkratik yang membentuk kebijakan Ma dalam rangka berdamai dengan China seperti yang dikemukakan oleh Alex Mintz, antara lain:

a) *Personality*

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *personality Ma Ying Jeou* untuk mengeluarkan kebijakan damai dengan China, yakni pola asuhan yang ditanamkan oleh ayahnya yakni menjadi pria yang berpikiran luas dengan tujuan nasionalis, kemudian lingkungan politik *Ma Ying Jeou* yang berasal dari partai Kuomintang yang begitu menghormati '*one china*' policy dan tidak ingin Taiwan merdeka dari China, kemudian Ma juga seorang yang menjunjung tinggi ajaran konfusianisme yang mengajarkan tentang perdamaian sesama manusia.

b) *Physical dan Mental Health*

Ma adalah seorang yang memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kebiasaan dalam aktivitas sehari-harinya untuk berolahraga. Maka, meski telah menjadi seorang politikus, Ma berlari setiap pagi dan sore secara rutin (Bradsher, 2008). Hal tersebut menjadi salah satu alasan penting juga mengapa Ma bisa berfikir rasional dalam menentukan pilihan untuk berdamai dengan China yang bersifat begitu *offensive* terhadap Taiwan dan memiliki kebangkitan militer yang pesat. Oleh karena itu, secara rasional Ma menganggap dengan adanya kerjasama akan meningkatkan ekonomi negara dan kerjasama juga bisa meredam konfliknya dengan China dan secara tidak langsung akan muncul perdamaian, sehingga negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar jika melakukan konfrontasi perang dengan China. Oleh karena itu, *Ma Ying Jeou* menganggap perlu menjalin hubungan baik dengan China agar perekonomian dapat semakin berkembang dan keamanan Taiwan tetap terjamin.

c) *Ego/Personality dan Ambition*

Sejak masa kampanye, Ma telah menjanjikan adanya normalisasi hubungan dengan China. Maka, dalam mencapai tujuannya untuk berdamai dengan China, Ma melakukan berbagai hal untuk mendekatkan Taiwan dengan China dan memberikan sinyal baik terhadap China, seperti pengakuan terhadap konsensus 1992, membuka kembali dialog SEF dan ARATS, dan menurunkan anggaran militer Taiwan agar China lebih lunak terhadap Taiwan. Padahal keputusan-keputusan tersebut mendapatkan banyak kritik dari partai oposisi dan masyarakat Taiwan, karena keputusan-keputusan *Ma Ying Jeou* tersebut dianggap sangat beresiko karena dapat menghilangkan kedaulatan Taiwan dan membuat depedensi Taiwan terhadap China semakin akut. Namun, hal tersebut tidak membuat *Ma Ying Jeou*

mundur dari tujuannya untuk berdamai dengan China, dan tetap melanjutkan ambisinya untuk membuat hubungan Taiwan dan China menjadi lebih baik. Dapat dilihat bahwa, *Ma Ying Jeou* sangat mengedepankan ego dan ambisinya dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkannya.

d) *Political History* dan *Personal Experiences*

Sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung di dalam dunia politik, *Ma Ying Jeou* adalah sosok yang sangat berpengalaman dalam politik terutama dalam menjadi pemimpin bagi masyarakat Taiwan. Ma banyak menduduki kursi pemerintahan, mulai dari menjadi ketua KMT, menjadi walikota Taipei, hingga mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2008. Pengalamannya yang telah banyak bersentuhan dengan dunia politik pada saat sebelum menjadi Presiden Taiwan, membuat *Ma Ying Jeou* menjadi piawai dalam memahami kondisi hubungan konfliktual antar Taiwan dan China, serta paham bagaimana cara untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam memperbaiki hubungannya dengan China sekaligus memenuhi kepentingan dan kebutuhan Taiwan.

e) *Perceptions* dan *Operational Reality*

Ma menganggap bahwa ditengah-tengah kebangkitan ekonomi China, adalah merupakan sesuatu hal yang merugikan bagi Taiwan karena tidak menggunakan kesempatan-kesempatan yang sebenarnya dimiliki oleh Taiwan jika berdamai dengan China, salah satunya adalah dapat melakukan kerjasama ekonomi dengan China untuk memperbaiki ekonomi Taiwan yang sempat terpuruk pada masa pemerintahan Chen Sui-bian. Selain itu, Ma menganggap China merupakan sebuah ancaman bagi Taiwan karena hubungannya yang cenderung bersifat konfliktual. Adanya ketegangan dan provokasi antara keduanya merupakan ancaman keamanan bagi Taiwan. Hal tersebut tentu merupakan sebuah posisi yang tidak menguntungkan bagi Taiwan jika memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan China, terlebih lagi letak geografis China dan Taiwan yang sangat berdekatan.

PERKEMBANGAN HUBUNGAN TAIWAN DAN CHINA DIBAWAH KEPEMIMPINAN MA YING JEOU

Terdapat beberapa peristiwa yang menandai progres hubungan Taiwan-China pada masa kepemimpinan *Ma Ying Jeou* seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a) Peningkatan Intensitas Kerjasama dan pertemuan antara Taiwan dengan China

Kerjasama-kerjasama yang nampak setelah Taiwan dibawah kepemimpinan presiden Ma, antara lain; yang pertama kerjasama dari segi pariwisata, China dan Taiwan membuka penerbangan langsung antara Taiwan dan China. Turis dari wilayah China Daratan juga diperbolehkan untuk mengunjungi Taiwan, kendati sebelumnya petugas imigrasi kedua negara saling menolak paspor. Berkat kerjasama ini, jutaan turis dari China datang ke Taiwan untuk berlibur (VOA Indonesia, n.d.). Kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Ma mulai mengurangi larangan-larangan bagi warganya untuk berinvestasi di China ataupun bagi warga China untuk berinvestasi di Taiwan. Akhirnya para investor Taiwan menanamkan investasi miliaran dolar di China, yang merupakan rumah bagi 1,3 juta orang dengan perekonomian kedua terbesar dunia (Taipei Economic and Cultural Office in Canada, n.d.).

Kemudian kerjasama ekonomi selanjutnya yakni sebuah perjanjian dagang yang disebut ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*). Dalam perjanjian ECFA ini, Taiwan dan China berjanji mengurangi pajak pada pos-pos barangnya masing-masing, dengan jumlah berbeda yang tercantum dalam perjanjian tersebut, termasuk didalamnya ada kesepakatan tentang jenis barang apa saja yang diekspor dan impor, penyesuaian tarif, penghapusan tarif ratusan produk, peraturan dalam aktivitas ekspor-impor, dan lain-lain (*Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)*, n.d.). Barang-barang yang sering diekspor maupun impor oleh Taiwan dan China, yakni produk-produk elektronik dan alat-alat berat.

b) Berkurangnya Konflik dan Ketegangan antar Taiwan dengan China

Konflik antara Taiwan, khususnya konflik bersenjata maupun konflik politik sudah tidak terlihat lagi di masa kepemimpinan *Ma Ying Jeou*. Bagi Ma, membaiknya hubungan dengan China adalah salah satu prioritas utamanya. Berkurangnya ketegangan konflik antar China dan Taiwan dibuktikan melalui pertemuan pertama antar *Ma Ying Jeou* dan Xi Jinping di Singapura. Dalam pertemuan tersebut, Ma dan Xi tidak membicarakan soal perdamaian dan perbaikan hubungan kedua negara, tapi lebih kepada bentuk simbolis menurunnya ketegangan antara China-Taiwan.

Untuk menjelaskan intensitas berkurangnya konflik antara Taiwan dan China, penulis akan memberikan perbandingan mengenai hubungan Taiwan dan China pada masa kepemimpinan sebelum *Ma Ying Jeou* dan masa kepemimpinan *Ma Ying Jeou*. Pada masa kepemimpinan Chiang Kai Shek tahun 1949-1975, berpindahnya pengakuan AS terhadap Beijing sebagai Negara China yang berdaulat dan membuat Taiwan hanya diakui sebagai bagian dari provinsi di China mengakibatkan tensi antara Taiwan dan China semakin meningkat dan kerap terjadi kontak militer antara Taiwan dan China di selat Taiwan. Begitupun juga saat kepemimpinan Chiang Ching-kuo (1978-1988), saat itu tensi diantara Taiwan dan China semakin memuncak dikarenakan adanya pemindahan pengakuan tersebut, sehingga mendorong Chiang Ching-Kuo untuk membentuk kebijakan luar negeriterhadap China yakni "*Three No's Policy*" yang dijabarkan sebagai tidak ada kontak, tidak ada negosiasi, dan tidak ada kompromi antara Taiwan dan China (Chang & Holt, 2011, p. 9).

Lalu, dibawah kepemimpinan Lee Teng-hui pada tahun 1988-2000. Lee Teng-hui menunjukkan keinginannya untuk mengembangkan proses Taiwanisasi masyarakat Taiwan. Kemudian adanya persetujuan untuk melaksanakan pemilihan umum yang memicu kemarahan dari Beijing karena Taiwan dianggap akan memerdekakan diri dari China. Akhirnya Beijing menyerang Taiwan melalui peluncuran misil di beberapa pelabuhan Taiwan (Taipei Economic and Cultural Office in Canada, n.d.).

Begitu pula pada masa pemerintahan sebelum *Ma Ying Jeou*, yakni Chen Shui-bian (2000-2008), Chen juga mengeluarkan kebijakan yang membuat hubungan antar China dan Taiwan semakin menegang, Chen membuat identitas Taiwanisedikalangan penduduk Taiwan yang lebih masif dari sebelumnya, Chen juga berusaha menghambat hubungan ekonomi Taiwan dan China dengan cara menggiring investor Taiwan untuk berinvestasi di wilayah lain dan tidak berinvestasi

di China dengan mengeluarkan kebijakan *Active Management, Effective Opening*. Kemudian, Ia juga berencana menghapus Dewan Unifikasi Nasional yang bertujuan untuk melihat prospek unifikasi antara Taiwan dan China. Selain itu, Chen juga berusaha melakukan referendum untuk mengubah konstitusi Taiwan dan melaksanakan referendum lain untuk melaksanakan pengajuan Taiwan sebagai anggota PBB (Anlin, 2011, p. 30).

Tentunya kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh para pemimpin sebelum *Ma Ying Jeou* menimbulkan hubungan yang semakin memburuk antara China dan Taiwan, dan justru kerap kali menimbulkan ketegangan serta konflik militer yang terjadi diantara keduanya. Dibawah kepemimpinan *Ma Ying Jeou*, hubungan Taiwan dan China mengalami masa pemulihan, *Ma Ying Jeou* mencoba membuka diri dan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap China. *Ma Ying Jeou* tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan para pendahulunya, yakni mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyulut kemarahan China sehingga melakukan penyerangan terhadap Taiwan. Kebijakan-kebijakan *Ma Ying Jeou* justru lebih ke arah perdamaian dengan China, seperti pengakuan terhadap konsensus 1992 (Taipei Times, 2008) dan membuka kerjasama dari segi pariwisata dan perdagangan dengan China (Taipei Economic and Cultural Office in Canada, n.d.)¹.

Selain itu, tidak ada lagi kontak militer yang terjadi antara Taiwan dan China seperti yang telah terjadi di masa kepemimpinan Lee Teng Hui (Taipei Economic and Cultural Office in Canada, n.d.). Kemudian, dikeluarkannya kebijakan *three no's policy (no unification, no independence, no use of force)* yang dicetuskan oleh *Ma Ying Jeou* juga merupakan langkah yang ditempuh *Ma Ying Jeou* untuk terbebas dari sikap *offensive* China, karena China sudah setuju untuk melakukan kerjasama dari berbagai bidang dengan Taiwan, secara tidak langsung berarti China telah menerima kebijakan *three no's policy* yang dicetuskan oleh *Ma Ying Jeou*, yang didalamnya ada makna "*no use of force*" yang berarti tidak ada paksaan serta penggunaan kekerasan dan senjata di dalam hubungan Taiwan dan China.

Kemudian, *Ma Ying Jeou* mengubah kebijakan Chen Shui-Bian yang mengimplementasikan kebijakan "*Active Management, Effective Opening*", yang memaksa investor-investor Taiwan untuk mendiversifikasi tujuan investasinya menuju negara lain selain China (Yut-zu, 2006). Kebijakan tersebut diubah dengan cara, Ma mulai mengurangi larangan-larangan bagi warganya untuk berinvestasi di China ataupun bagi warga China untuk berinvestasi di Taiwan. Kemudian, adanya kebijakan *Ma Ying Jeou* untuk menekan anggaran pertahanan Taiwan. Anggaran pertahanan Taiwan yang dikeluarkan oleh *Ma Ying Jeou* tidak pernah melewati nilai 3% dari total PDB Taiwan (Minnick, 2012), dimana hal tersebut merupakan sinyal baik yang diberikan *Ma Ying Jeou* kepada China sebagai bukti bahwa Taiwan tidak ingin berlomba-lomba dalam meningkatkan kekuatan militernya dengan China, sehingga tidak ada lagi konflik bersenjata yang terjadi seperti pada masa pemerintahan Chiang Kai-Sek.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa *Ma Ying Jeou* tidak ingin membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya memprovokasi China, karena tujuan utama Taiwan adalah untuk memberikan sinyal baik terhadap China agar China dapat bersikap lebih lunak terhadap Taiwan. Terbukti, dengan kebijakan-kebijakan tersebut, China

menyambut dengan baik itikad Taiwan untuk berdamai, terlihat dari kerjasama-kerjasama yang terjalin. Tentunya, dari hubungan kerjasama yang baik, tentunya akan mengurangi konflik dan ketegangan yang terjadi di antara Taiwan dan China.

KESIMPULAN

Terpilihnya *Ma Ying Jeou* sebagai Presiden Taiwan pada tahun 2008, membawa hubungan konfliktual antara Taiwan dengan China berangsur-angsur mulai mereda. Sejak masa kampanyenya, Presiden Ma berjanji untuk memperbaiki hubungan antara Taiwan dan China yang sempat tidak harmonis dari masa kepemimpinan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan luar negeri yang *Ma Ying Jeou* ambil dalam memperbaiki hubungannya dengan China, yakni dibukanya kembali dialog antara SEF dan ARATS, setelah 10 tahun lamanya terhenti. Kemudian membuka kerjasama ekonomi dengan China melalui perjanjian ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*). ECFA mengatur hubungan dagang antar keduanya. Kemudian, adanya pengakuan kembali terhadap konsesus 1992, dan dikeluarkannya kebijakan '*three no's policy*' oleh *Ma Ying Jeou*, yang berarti '*no independence, no unification, and no use of force*'.

Kebijakan-kebijakan tersebut disambut dengan baik oleh China, dibuktikan dengan meningkatnya intensitas kerjasama dan pertemuan antara Taiwan dan China melalui SEF dan ARATS. Kemudian, sudah tidak ada lagi konflik bersenjata dan ketegangan antara keduanya yang terjadi seperti masa kepemimpinan sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa *Ma Ying Jeou* berhasil menjadikan hubungan antara Taiwan dan China semakin membaik setelah 59 tahun lamanya berkonflik.

REFERENSI

- Anlin, Y. (2011). Cross-Taiwan Strait Relations and Beijing's Taiwan Policy Adjustment since 1979. In K. G. Cai (Ed.), *Cross-Taiwan Straits Relations Since 1979: Policy Adjustment and Institutional Change Across The Strait*. World Scientific Publishing.
- Bradsher, K. (2008). *Dicipline First For Tiawan's New Leader*. New York Times. <http://www.nytimes.com/2008/03/24/world/asia/24taiwan.html>,
- Chang, H. C., & Holt, G. R. (2011). Naming China: An Analysis of Taiwan's National Day Speeches. *Journal of Language and Politics*, 10(3). <http://www2.comm.niu.edu/faculty/rholt/eoc/CVnamingChina.pdf>.
- Eby Hara, A. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri*. Nuansa.
- Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA). (n.d.). *Economic Cooperation Framework Agreement*. <http://www.ecfa.org.tw/EcfaAttachment/ECFADoc/ECFA.pdf>
- Goldstein, S. (2012). *Cross-Strait Relations on The Eve of Ma Ying Jeou's Second Term*. The National Bureau of Asian Research. <http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=252#.UdYhclPWEUs>.
- Hickey, D. V. V. (2007). *Foreign Policy Making In Taiwan: From Principle to Pragmatism*. Routledge.
- Jehnings, R. (2008). *Taiwan's New Leader's Take Office On China Pledges*. International Herald Tribune.

- Johnston, C. (2008). *Talking to Taiwan's New President*. TIME. <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1831748,00.html>
- Laksono, D. A. (2018). Pengaruh Idiosinkratik *Shinzo Abe* terhadap Upaya Perubahan kebijakan Luar negeri jepang dari Pasifisme Idealis menjadi Pasifisme Proaktif. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(3), 58–70. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi73b2516703full.pdf>
- Lin, C. Y., & Roy, D. (2011). *The Future of United States, China, and Taiwan Relations*. Palrave Macmillan.
- Lin, Y. C. G. (2011). *The Background and Impacts of ECFA on China and Taiwan*. Makalah dipresentasikan di National Chung Cheng University, Taiwan pada 19 Maret 2011.
- Mainland Affairs Council. (n.d.). *Eighth Chiang-Chen Talks are Successfully Held: The SEF and the ARATS sign the "Cross-Strait Investment Protection and Promotion Agreement" and the "Cross-Strait Customs Cooperation Agreement" and announce a "Consensus on the Protection of Personal Freedoms"*. <http://www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=102788&ctNode=7316&mp=181>.
- Mainland Affairs Council. (2009). *Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement: Policy Explanation*. <http://www.mac.gov.tw/public/Data/962614391871.pdf>.
- Minnick, W. (2012). *CRS Report Reviews US, Taiwan Relations*. Defense News. <http://www.defensenews.com/article/20120524/DEFREG02/305240003/CRS-Report-Reviews-Taiwan-Security-U-S-Relations>
- Mintz, A., & DeRouen Jr., K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press.
- Sullivan, J., & Sapir, E. V. (2012). *Ma Ying Jeou's Presidential Discourse*. *Journal of Current Chinese Affairs*, 41(3), 33–68.
- Taipei Economic and Cultural Office in Canada. (n.d.). *The 1992 Consensus: The Foundation for Cross-Strait Peace and Stronger International Links*. <http://www.roc-taiwan.org/CA/ct.asp?xItem=219017&ctNode=150&mp=77&nowPage=4&pagesize=15>
- Taipei Times. (2008). *Looking Behind Ma's Three No's*. <http://www.taipetimes.com/News/editorials/archives/2008/01/21/2003398185>
- VOA Indonesia. (n.d.). *China Marah, AS Berencana Jual Senjata ke Taiwan*. <https://www.voaindonesia.com/a/china-marah-as-berencana-jual-%09senjata-ke-taiwan/3107733.html>
- Yut-zu, C. (2006). *Chen to Tighten Cross-Strait Policies*. Taipei Times. <http://www.taipetimes.com/News/front/archives/2006/01/02/2003287016>